

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial pada bentuk pemerintahan publik. Indonesia juga menggunakan konsep otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam membentuk kesejahteraan rakyat. Pada pelaksanaannya otonomi daerah menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk belanja daerah dengan meyakini asas kebutuhan, kemampuan dan kepatuhan daerah yang tertulis dalam anggaran daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh setiap Pemerintah daerah, karena ketidakseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan akan menimbulkan kesenjangan fiskal. Adanya pemberian otonomi daerah kepada suatu daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada suatu daerah dalam pembangunannya melalui berbagai usaha yang mungkin mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu dalam kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menelusuri sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk penyelenggaraan

pemerintahnya. Pemerintah daerah harus meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi yang ada tanpa melanggar norma (Halim, 2001).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan daerah tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi PAD diantaranya PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal. Variabel-variabel tersebut sudah mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.

Tabel 1.1

PAD Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)		
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Timur
2018	43.327.000.000.000	19.642.915.448.000	18.531.062.021.000
2019	45.707.000.000.000	21.244.266.598.000	19.327.125.485.000
2020	57.561.000.000.000	25.223.220.670.000	17.951.235.057.000
Total	146.595.000.000.000	66.110.402.716.000	55.809.422.563.000

Sumber : BPS. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DKI Jakarta. Jawa Timur (Ribu Rupiah).2018-2020 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan PAD Provinsi DKI Jakarta lebih besar dari pada PAD di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 PAD Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 57.56 Triliun, sedangkan PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 meningkat menjadi 25.23 Triliun. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta,

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dimana ketika suatu wilayah memiliki penduduk yang banyak namun pendapatan daerahnya rendah maka pendapatan di wilayah tersebut dikatakan masih belum berjalan secara maksimal.

Terbatasnya PAD yang dimiliki Kabupaten/Kota Jawa Barat menyebabkan beberapa daerah mengalami ketimpangan dengan daerah yang memiliki PAD yang tinggi, maka dari itu pemerintah Jawa Barat perlu menekankan beberapa daerah yang masih kurang tingkat pendapatan daerahnya. Sehingga pada kenyataannya yang terjadi sekarang yaitu kontribusi Pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah sangat tidak sebanding, dimana Pemerintah pusat memberikan dana daerah dengan jumlah yang besar dibandingkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja daerahnya sehingga dapat menimbulkan adanya perbandingan antara daerah yang memiliki sumber kekayaan besar dengan daerah yang memiliki sumber kekayaan yang kecil.

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada wilayah tersebut. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah tertentu. Dalam perhitungan PDRB terdapat dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Barat 2018-2020

Wilayah Jawa Barat	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah)		
	2018	2019	2020
Kab. Bogor	148,203.35	156,876.01	154,113.60
Kab. Sukabumi	44,140.89	46,628.34	46,199.31
Kab. Cianjur	30,320.21	32,039.32	31,790.76
Kab. Bandung	77,613.22	82,547.44	81,059.06
Kab. Garut	37,225.15	39,092.49	38,598.15
Kab. Tasikmalaya	23,320.61	24,586.67	24,344.86
Kab. Ciamis	20,878.69	22,001.24	21,970.41
Kab. Kuningan	15,821.96	16,864.15	16,882.76
Kab. Cirebon	32,161.84	33,668.10	33,304.49
Kab. Majalengka	20,006.88	21,561.72	21,754.54
Kab. Sumedang	22,507.96	23,932.73	23,665.01
Kab. Indramayu	58,287.98	60,153.18	59,200.02
Kab. Subang	27,408.20	28,672.90	28,342.56
Kab. Purwakarta	44,341.65	46,278.21	45,293.24
Kab. Karawang	157,317.84	163,946.85	157,710.59
Kab. Bekasi	241,949.38	251,502.79	242,959.09
Kab. Bandung Barat	29,888.89	31,398.35	30,640.41
Kab. Pangandaran	7,308.73	7,742.87	7,738.97
Kota Bogor	30,413.57	32,295.73	32,162.74
Kota Sukabumi	8,209.92	8,664.02	8,534.72
Kota Bandung	185,084.18	197,642.89	193,144.95
Kota Cirebon	15,817.18	16,812.49	16,648.44
Kota Bekasi	65,845.09	69,406.53	67,619.24
Kota Depok	45,978.89	49,076.58	48,135.59
Kota Cimahi	21,192.60	22,856.04	22,340.56
Kota Tasikmalaya	14,859.11	15,746.12	15,430.02
Kota Banjar	3,067.11	3,221.45	3,251.70
Provinsi Jawa Barat	1,419,624.14	1,490,959.69	1,453,380.72

Sumber : BPS. PDRB Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2018-2020. (diolah).

Berdasarkan tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 1.45 Milyar Rupiah. PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Banyaknya warga Jawa Barat yang kehilangan pendapatannya karena adanya pemberlakuan pembatasan sosial demi meredam penularan pandemi. Jika mengacu kepada penggolongan Bank Dunia, Jawa Barat masuk ke dalam kategori wilayah dengan penduduk yang memiliki pendapatan menengah bawah.

Menurut penelitian Ni Luh Putu Wulandari (2021) mengatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya infrastruktur dan prasarana publik yang menunjang perekonomian wilayahnya, dapat meningkatkan PAD.

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Adanya jumlah penduduk yang produktif dalam perekonomian dapat meningkatkan pendapatan yang diterima Pemerintah daerah. Dampak negatif dari bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah antara lain tingginya kriminalitas, tingginya angka pengangguran dan memburuknya kondisi sosial. Jawa Barat adalah Provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia secara tidak langsung menuntut pengelolaan keuangan daerahnya yang maksimal. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 49.935.858 Juta Jiwa, yang tersebar dari 27 Kabupaten/Kota.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Wilayah Jawa Barat	Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Kab. Bogor	5.840.907	5.965.410	6.088.233
Kab. Sukabumi	2.460.693	2.466.272	2.470.219
Kab. Cianjur	2.260.620	2.263.072	2.264.328
Kab. Bandung	3.717.291	3.775.279	3.831.505
Kab. Garut	2.606.399	2.622.425	2.636.637
Kab. Tasikmalaya	1.751.295	1.754.128	1.755.710
Kab. Ciamis	1.188.629	1.195.176	1.201.685
Kab. Kuningan	1.074.497	1.080.804	1.087.105
Kab. Cirebon	2.176.213	2.192.903	2.209.633
Kab. Majalengka	1.199.300	1.205.034	1.210.709
Kab. Sumedang	1.149.906	1.152.400	1.154.428
Kab. Indramayu	1.719.187	1.728.469	1.737.624
Kab. Subang	1.579.018	1.595.825	1.612.576
Kab. Purwakarta	953.414	962.893	971.889
Kab. Karawang	2.336.009	2.353.915	2.370.488
Kab. Bekasi	3.630.907	3.763.886	3.899.017
Kab. Bandung Barat	1.683.711	1.699.896	1.714.982
Kab. Pangandaran	397.187	399.284	401.493
Kota Bogor	1.096.828	1.112.081	1.126.927
Kota Sukabumi	326.282	328.680	330.691
Kota Bandung	2.503.708	2.507.888	2.510.103
Kota Cirebon	316.277	319.312	322.322
Kota Bekasi	2.931.897	3.003.923	3.075.690
Kota Depok	2.330.333	2.406.826	2.484.186
Kota Cimahi	607.811	614.304	620.393
Kota Tasikmalaya	662.723	663.517	663.986
Kota Banjar	182.819	183.110	183.299
Provinsi Jawa Barat	48.683.861	49.316.712	49.935.858

Sumber : BPS. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Barat 2018-2020 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.2 dari hasil kegiatan Sensus Penduduk tahun 2020 diketahui bahwa penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun

2020 sebanyak 49.93 Juta jiwa. Dilihat dari hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Keberhasilan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dengan adanya jumlah penduduk, yang mana ketika banyaknya jumlah penduduk akan mempercepat kegiatan konsumsi dan produksi yang menimbulkan permintaan agregat. Oleh karena itu jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah.

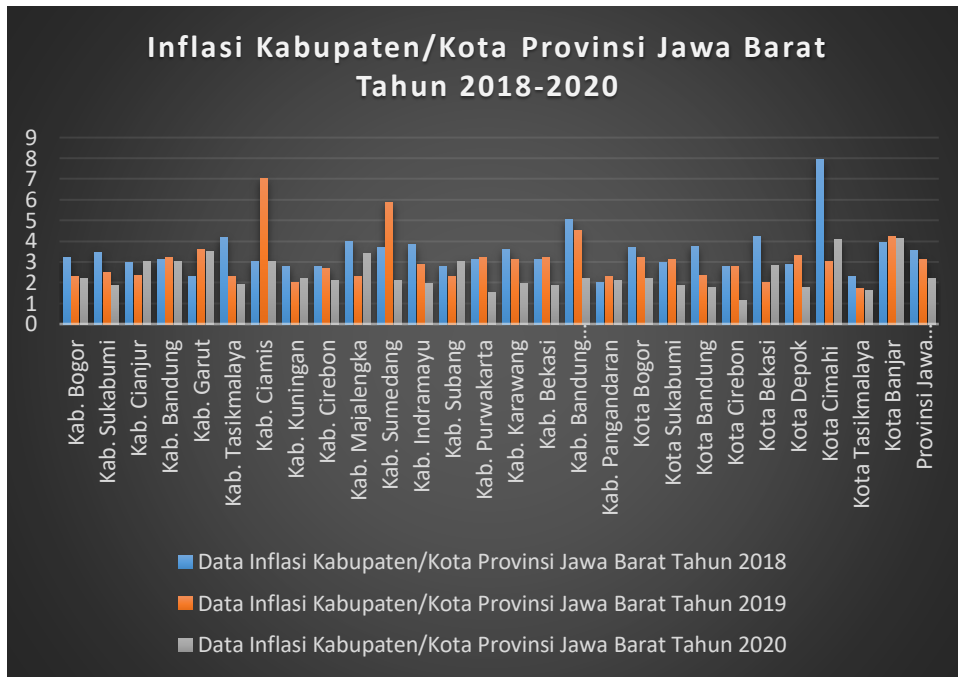
Menurut penelitian Pidelis (2016) mengatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Nabire Papua. Yang artinya masih kurangnya masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Nabire Papua karena PAD di Kabupaten Nabire Papua masih belum ada peningkatan.

Meningkatnya aktivitas penduduk akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan yang berlebihan akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi akan menimbulkan efek pada perekonomian salah satunya dengan mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2014:2).

Inflasi merupakan suatu keadaan yang menjelaskan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Inflasi yang stabil akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan inflasi yang tidak stabil akan berdampak negatif untuk kondisi ekonomi suatu daerah.

Gambar 1.1

Data Inflasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020



Sumber : BPS. Inflasi Tahunan (Persen) Provinsi Jawa Barat. 2018-2020 (diolah).

Berdasarkan gambar 1.1 Penyebab rendahnya inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah beberapa produk yang mengalami deflasi. Seperti turunnya harga beras, mobil, bawang merah, telur ayam, dan cabai merah, Penyebab tingginya inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama satu tahun adalah kenaikan harga rokok, harga minyak goreng, tarif tol. Inflasi Jawa Barat pada tahun 2021 tercatat sebesar 0.46 persen. Kota dengan inflasi tertinggi sebesar 0.56 persen, sedangkan Kota Depok inflasi terendah sebesar 0.33 persen pada Desember 2021. Tingginya inflasi akan mengakibatkan rendahnya daya beli

masyarakat, dan sebaliknya rendahnya inflasi akan mengakibatkan tingginya daya beli masyarakat.

Adanya inflasi di suatu daerah akan menggambarkan adanya gejala ekonomi, apabila inflasi dibiarkan tanpa ada kendali maka akan berdampak pada perekonomian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Iwan (2016) secara simultan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Malang. Sedangkan secara parsial inflasi mempunyai nilai yang tidak signifikan atau hanya mempunyai pengaruh rendah terhadap PAD karena inflasi merupakan dampak pergerakan ekonomi secara positif ataupun negatif.

Untuk dapat menghasilkan PAD Pemerintah harus memiliki modal yang tidak sedikit. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan daya tarik terhadap investasi salah satunya dari kemampuan daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan investasi (Utami,2011).

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal terdiri dari belanja modal aset tetap dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal lainnya secara umum terdiri dari belanja bunga, belanja pegawai dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.

Peningkatan Pemerintah daerah dalam belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD

(Mardiasmo,2002). Dalam upaya meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan kemampuan pendapatan yang dimiliki salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang besar untuk pembangunan sektor-sektor yang produktif di suatu daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Tabel 1.4

Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019

Wilayah Jawa Barat	Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019 (Ribu Rupiah)		
	2017	2018	2019
Kab. Bogor	1,525,152,052	1,313,828,739	1,567,693,720
Kab. Sukabumi	545,840,507	614,381,110	603,895,033
Kab. Cianjur	823,214,700	928,610,308	690,653,593
Kab. Bandung	542,067,254	713,093,010	1,088,249,765
Kab. Garut	614,795,700	537,593,476	1,092,730,272
Kab. Tasikmalaya	568,755,087	524,867,663	636,907,994
Kab. Ciamis	432,320,118	442,374,318	520,316,832
Kab. Kuningan	316,826,826	221,662,069	251,909,010
Kab. Cirebon	609,568,213	510,923,940	587,833,749
Kab. Majalengka	605,772,199	681,604,697	643,663,697
Kab. Sumedang	498,572,941	410,348,713	605,698,351
Kab. Indramayu	776,090,158	769,879,618	982,685,411
Kab. Subang	421,266,296	494,512,473	458,838,832
Kab. Purwakarta	416,588,905	228,163,718	329,288,710
Kab. Karawang	745,196,437	697,603,265	704,170,848
Kab. Bekasi	971,090,629	853,621,639	954,900,806
Kab. Bandung Barat	374,666,687	264,540,319	338,001,326
Kab. Pangandaran	264,060,180	284,898,372	499,054,520
Kota Bogor	432,861,752	455,461,723	501,033,406
Kota Sukabumi	217,077,378	140,100,688	192,377,947

Kota Bandung	1,629,964,076	1,049,696,223	1,179,429,469
Kota Cirebon	220,222,341	175,451,469	269,915,807
Kota Bekasi	1,219,848,649	780,096,411	1,080,944,259
Kota Depok	857,242,346	770,053,793	926,089,374
Kota Cimahi	837,679,720	276,020,230	260,337,997
Kota Tasikmalaya	413,597,746	374,596,059	445,498,342
Kota Banjar	215,242,342	193,782,528	208,991,724
Provinsi Jawa Barat	1,693,276,733	3,145,847,260	2,530,347,542

Sumber : BPS. *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2018-2020 (diolah).*

Berdasarkan tabel 1.4 belanja modal Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang sangat besar menjadi 2.19 Milyar. Belanja modal pada tahun 2020 menurun karena adanya dampak dari refocusing yang membuat keuangan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menjadi terganggu. Pemerintah pun memilih bersikap selektif dalam berbelanja.

Belanja modal adalah salah satu faktor dalam meningkatnya PAD. Kusnandar dan Dodik (2015) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa PAD walaupun dalam proporsi penerimaan kecil namun sangat berpengaruh pada belanja modal hal ini menjelaskan bahwa PAD adalah sumber penting pendapatan yang dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang mana PAD Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua di Indonesia, maka berdasarkan variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal, hal inilah yang dapat mempengaruhi variabel PAD. Selain itu didalam penelitian ini dilihat bagaimana pengaruh variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal. Serta seberapa besar pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Barat. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan PDRB, jumlah penduduk, inflasi, belanja modal, dan PAD di Kab/Kota Jawa Barat tahun 2010-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal terhadap PAD di Kab/Kota Jawa Barat tahun 2010-2020 secara simultan dan parsial ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan PDRB, jumlah penduduk, inflasi, belanja modal, dan PAD di Kab/Kota Jawa Barat tahun 2010-2020,
2. Mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal terhadap PAD di Kab/Kota Jawa Barat tahun 2010-2020 secara simultan dan parsial.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang sejenisnya berkaitan dengan PAD serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan. terkait dengan analisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal terhadap PAD.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.3.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1.3.2.1 Bagi Lembaga Pendidikan

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.3.2.2 Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membawa pengetahuan baru dalam bidang ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi Pembangunan.

1.3.2.3 Bagi Mahasiswa/i

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.3.2.4 Bagi Penulis

Menelusuri pengaruh pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat merupakan tantangan tersendiri bagi penulis.